

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG

### *ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT POLICY IN THE DEVELOPMENT OF CAPTURE FISHERIES AT THE BLANAKAN COASTAL FISHING PORT SUBANG REGENCY*

Shafa Azzahra<sup>1\*</sup>, Asep Agus Handaka Suryana<sup>1</sup>, Titin Herawati<sup>1</sup>, Ine Maulina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran

\*Penulis korespondensi: [shafa22002@unpad.ac.id](mailto:shafa22002@unpad.ac.id)

Received Manuscript: 23 Maret 2026

Final Revision: 30 Maret 2026

Approved: 07 April 2026

Online Access: 26 Mei 2026

Published: 30 Juni 2026

#### ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan merupakan salah satu pusat kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Subang yang memiliki peran penting untuk mendukung perekonomian wilayah pesisir, namun pengembangan sektor perikanan tangkapnya di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan struktural. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan dengan mengukur tingkat efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan adalah survei deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner terhadap 30 nelayan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis kebijakan dilakukan dengan mengacu pada enam kriteria indikator William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sektor perikanan tangkap, meskipun tetap perlu ditingkatkan supaya hasil yang dicapai dapat lebih optimal. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 hingga 2025 di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi di lapangan dan biaya operasional nelayan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi kebijakan dalam menjaga stabilitas usaha perikanan tangkap. Penilaian berbasis skala Likert menunjukkan indikator pemerataan sebagai yang tertinggi dan indikator kecukupan berada pada posisi terendah. Rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis yaitu penguatan program KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), optimalisasi distribusi subsidi bahan bakar, penguatan kelembagaan KUD Mina Fajar Sidik, dan regenerasi nelayan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan, Pemerintah Daerah, Perikanan Tangkap.

#### ABSTRACT

Blanakan Coastal Fishing Port is one of the main capture fisheries centers in Subang Regency, playing an important role in supporting the coastal region's economy. However, the development of the capture fisheries sector faces a range of structural challenges. This study aims to identify local government policies that have been implemented and to measure the effectiveness of their implementation. A descriptive survey method was employed, with data collected through interviews and questionnaires administered to 30 fishermen selected using purposive sampling. Policy analysis was conducted based on six evaluation criteria proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The policies have contributed to the management of the capture fisheries sector, although further improvement is needed to achieve more optimal outcomes. Capture fisheries production from 2021 to 2025 at Blanakan Coastal Fishing Port experienced fluctuations influenced by multiple factors, including operational conditions and fishermen's operational costs. These conditions indicate the need for policy intervention to maintain the stability of capture fisheries enterprises. Assessment using a Likert scale indicates that the equity indicator



*has the highest score, while the adequacy indicator has the lowest score among all criteria. Strategic recommendations derived from the analysis include strengthening the KUSUKA program (Marine and Fisheries Business Actor Card), optimizing fuel subsidy distribution, strengthening the institutional capacity of KUD Mina Fajar Sidik, and promoting fishermen regeneration.*

*Keywords: Blanakan Coastal Fishing Port, Capture Fisheries, Local Government, Policy Analysis, Policy Evaluation*

Cara citasi: Azzahra, S., Suryana, A. A. H., Herawati, T., Maulina, I. 2026. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan Kabupaten Subang. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 10(1), 67-80, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2026.10.1.67/>

## PENDAHULUAN

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan (Husuna *et al.*, 2017). Sektor perikanan memegang peran strategis dalam menopang pembangunan ekonomi nasional atau daerah didukung oleh potensi sumber daya perikanan yang tersedia. Potensi perikanan tangkap yang memberikan kontribusi signifikan dengan tingginya jumlah nelayan, volume hasil tangkapan, dan ekonomi pesisir. Kabupaten Subang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki garis pantai dengan panjang yang cukup signifikan dan masyarakat pesisir sebagai sumber utama penghidupan yang memiliki ketergantungan kegiatan penangkapan ikan. Perikanan tangkap di Kabupaten Subang menghadapi tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap. Tantangan utama yang dihadapi oleh setiap wilayah adalah pelaksanaan pembangunan perikanan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi subsektor perikanan yang memberikan hasil komoditas bernilai tambah tinggi bagi masyarakat dan tetap mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia (Bussalam & Hunianto, 2024).

Kabupaten Subang memiliki Pelabuhan Perikanan Pantai yang berada di kecamatan Blanakan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap yang berawal dari pendaratan ikan, distribusi hasil tangkapan, dan aktivitas masyarakat pesisir. Pengembangan perikanan tangkap di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kapasitas nelayan, sarana prasarana, kondisi alam, dan ketersediaan stok ikan. Perikanan tangkap menghadapi permasalahan antara lain keterbatasan modal usaha, rendahnya diversifikasi alat tangkap, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, dan minimnya akses nelayan terhadap teknologi informasi dan pasar. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas dan kontribusi perikanan tangkap terhadap peningkatan nilai tambah dan perekonomian daerah pesisir. Nelayan sebagai pelaku utama yang dilibatkan secara aktif untuk kebijakan yang ada berdasarkan sesuai kebutuhan keberlanjutan pengembangan perikanan tangkap. Nelayan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia sumber pangan nasional atau hasil perikanan, nelayan juga sebagai faktor yang penting keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Natsir & Kartini, 2025).

Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Optimasi potensi kelautan dan perikanan membutuhkan kontribusi aktif dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu masyarakat pesisir dan institusi pemerintah merupakan fondasi utama dalam pengembangan sektor ini (Adilah *et al.*, 2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan tangkap tidak sepenuhnya berjalan secara optimal. Implementasi kebijakan menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran rasa tanggung jawab masyarakat nelayan, sarana dan prasarana, perahu, alat tangkap, keterampilan nelayan, dan sosialisasi pemerintah pelaksanaan program (Malik & Saribulan, 2018).

Tata kelola pemerintahan kebijakan daerah dalam pengembangan perikanan tangkap diperlukan memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pertimbangan kondisi perikanan tangkap diperlukan suatu analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan tangkap di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan Kabupaten Subang. Analisis ini penting untuk mengetahui kebijakan perikanan tangkap dengan menganalisis



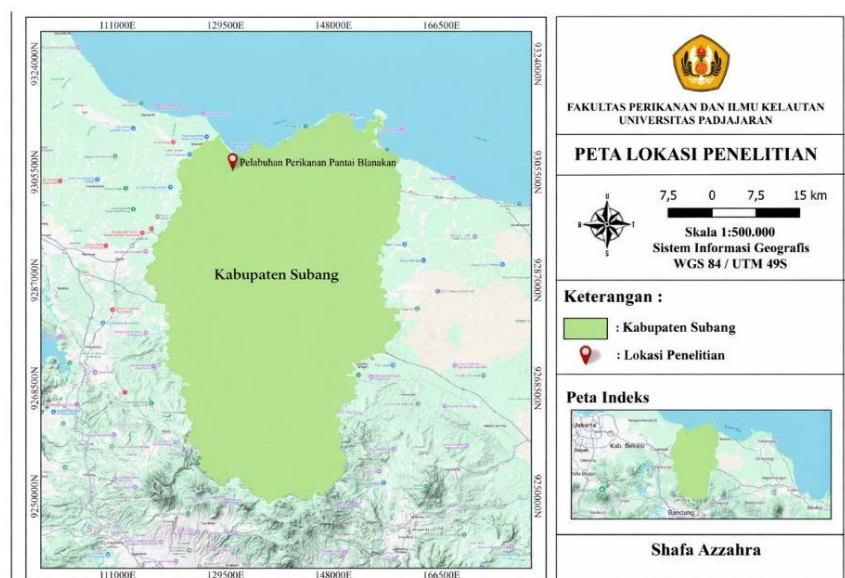
kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah seperti mengakomodasi kebutuhan nelayan, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan tata kelola pemerintah yang baik. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah merumuskan evaluasi untuk penguatan kebijakan pengelolaan keberlanjutan dalam perikanan tangkap.

## METODOLOGI

Metode penelitian dilakukan menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan untuk mengidentifikasi dengan menganalisis permasalahan atau mendapatkan pembenaran terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Purnia *et al.*, 2020). Metode survei bertujuan untuk menggambarkan persepsi responden dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan tangkap berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan data yang diperoleh secara langsung di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan Kabupaten Subang.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Pantai Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian berlangsung yang dimulai pada bulan Januari hingga bulan Juni 2026.



**Gambar 1. Lokasi Penelitian, Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan**  
(Sumber: Peneliti 2026)

### Jenis dan Metode Pengambilan Data

Jenis data penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama didapatkan oleh peneliti secara langsung melalui proses pengumpulan data dalam penelitian (Sulung & Muspawi, 2024). Data primer berdasarkan hasil responden yang menjawab berbagai pertanyaan dengan dibuatkan oleh peneliti. Responden tersebut adalah nelayan untuk mengetahui persepsi nelayan mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan perikanan tangkap, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan. Data sekunder adalah data pendukung didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung berdasarkan sumber-sumber yang telah tersedia (Ekasari *et al.*, 2025). Pengambilan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan terdokumentasi yang telah tersedia sebelumnya seperti literatur, dokumen, dan artikel ilmiah.

### Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode untuk menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Jaya, 2020). Responden yang

dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam kegiatan perikanan tangkap maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan Kabupaten Subang. Pemilihan kriteria nelayan sebagai responden adalah nelayan aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan, nelayan yang memiliki pengalaman melaut, dan bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah responden ditentukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan analisis dan ketersediaan responden di lokasi penelitian. Ukuran sampel yang dianggap layak berkisar 30 hingga 500 responden dengan dipilih untuk mendapatkan hasil analisis memiliki kekuatan statistik yang memadai (Sugiyono, 2019).

## Metode Analisis Data

### Analisis Implementasi

Analisis data dilakukan menggunakan variabel evaluasi implementasi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang dapat dilihat pada Tabel.

**Tabel 1. Definisi Operasional**

| Indikator     | Definisi Operasional                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektivitas   | Tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan tangkap |
| Efisiensi     | Tingkat optimalisasi kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah          |
| Kecukupan     | Tingkat kecukupan kebijakan pemerintah mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan   |
| Pemerataan    | Tingkat pemerataan manfaat kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan                |
| Responsivitas | Tingkat pemerintah menyesuaikan dan menanggapi terhadap keluhan nelayan               |
| Ketepatan     | Tingkat ketepatan kebijakan pemerintah dengan pengembangan perikanan tangkap          |

### Analisis Persepsi Responden

Analisis Persepsi Responden dilakukan menggunakan metode *skoring*. Metode *skoring* digunakan dengan setiap parameter hasil jawaban responden diberikan bobot nilai berdasarkan tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang ditentukan dalam kuesioner. Pengukuran persepsi responden menggunakan skala Likert sebagai instrumen mengukur pendapat dan penilaian responden terhadap kebijakan pemerintah daerah. Perhitungan skala Likert berdasarkan lima tingkat yaitu sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju yang pengukurannya disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Skala Likert**

| Kategori      | Skor |
|---------------|------|
| Sangat Setuju | 5    |
| Setuju        | 4    |
| Netral        | 3    |
| Kurang Setuju | 2    |
| Tidak Setuju  | 1    |

Tabel diatas merupakan perhitungan Skala Likert yang ada di dalam kuesioner. Hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden langkah berikutnya memasukkan ke dalam rumus untuk mempresentasikan hasil rata-rata (*mean*) berdasarkan skala Likert sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan :

$\bar{x}$  = Rata-rata (*mean*)

$\sum x$  = Total jumlah data

$n$  = Jumlah responden



Interpretasi skala Likert untuk menghasilkan dalam bentuk persentase dimulai dari 0 sampai 100 persen sesuai dengan kategori, maka dapat dikategorikan seperti pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kategori Persentase Interpretasi Skala Likert**

| Kategori            | Persentase |
|---------------------|------------|
| Sangat Tidak Setuju | 0%-20%     |
| Tidak Setuju        | 21%-40%    |
| Netral              | 41%-60%    |
| Setuju              | 61%-80%    |
| Sangat Setuju       | 81%-100%   |

Tabel 3 merupakan skala Likert untuk perhitungan dalam bentuk persentase yang dapat dimasukkan ke dalam tabel dan grafik. Hasil analisis persepsi responden sebagai dasar mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dan mengoptimalkan kebijakan yang lebih efektif berikutnya.

### Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketepatan dan kesesuaian data yang dikumpulkan untuk diteliti (Prambudi & Imantoro, 2021). Validitas berasal dari istilah *validity* yang bermakna keabsahan atau kebenaran (Sugiono, 2020). Uji validitas yang digunakan untuk perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{((N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2))}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total

$N$  = Jumlah subjek penelitian

$\sum xy$  = Jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total

$\sum x$  = Jumlah skor butir

$\sum y$  = Jumlah skor total

$\sum x^2$  = Jumlah kuadrat skor butir

$\sum y^2$  = Jumlah kuadrat skor total

Kriteria pengujian validitas:

Nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka hipotesis tersebut dinyatakan valid

Nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka hipotesis tersebut dinyatakan tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan dalam pengukuran variabel yang dianalisis untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Reliabilitas berasal dari istilah *reliability* yang memiliki makna dapat tahan uji atau dipercaya (Sugiono, 2020). Reliabilitas merupakan pengujian digunakan sebagai pengukuran sejauh mana suatu instrumen dapat menghasilkan data tetap konsisten dan stabil (Amalia *et al.*, 2022). Uji Reliabilitas dilakukan dengan penggunaan rumus sebagai berikut:

$$r = \left( \frac{k}{(k-1)} \right) \times \left( 1 - \frac{\sum ab^2}{at^2} \right)$$

Keterangan :

$r$  = Nilai Reliabilitas

$at^2$  = Jumlah Varian Total

$K$  = Banyak Butir Pertanyaan

$\sum ab^2$  = Jumlah Varian Butir





Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan rumus *Alpha*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel, sedangkan jika nilai  $r$  hitung  $< r$  tabel dinyatakan tidak reliabel (Prambudi & Imantoro, 2021). Skala *Alpha* diukur dengan skala awal 0 dan skala akhir 1 hal tersebut dapat diamati pada Tabel 4 yang disajikan berikut ini:

**Tabel 4. Tingkat Reliabilitas Nilai Alpha**

| Alpha       | Reliabilitas    |
|-------------|-----------------|
| 0,00 – 0,20 | Kurang Reliabel |
| 0,21 – 0,40 | Agak Reliabel   |
| 0,41 – 0,60 | Cukup Reliabel  |
| 0,61 – 0,80 | Reliabel        |
| 0,81 – 1,00 | Sangat Reliabel |

Sumber: Ristianti & Fathurrochman (2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan

Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap terbesar terletak di Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang di kawasan Pantai Utara Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 Laut Jawa. Berdasarkan letak geografis Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan berada pada posisi 107°30'BT-107°53'BT dan 6°10'LS-6°22'LS. Pelabuhan Perikanan Pantai dikenal sebagai pemasok ikan laut yang mendominasi di wilayah Kabupaten Subang (Mustaruddin *et al.*, 2023). Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan adalah salah satu pelabuhan dari sembilan pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Subang dan dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Fajar Sidik.

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan memiliki keterlibatan oleh beberapa lembaga berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan pemerintah provinsi untuk memegang kewenangan otoritas wilayah perairan laut 0 sampai 12 mil. Pemerintah daerah sebagai pelaksanaan koordinasi teknis pada kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan Kabupaten Subang seperti Tempat Pengelolaan Ikan (TPI) dan pemberdayaan nelayan.

### Kondisi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Berdasarkan data produksi tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Data Produksi Tahun 2021-2025**

| Tahun | Volume Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 2021  | 3.899.300            | 32.843.190.000       |
| 2022  | 3.533.500            | 31.062.013.000       |
| 2023  | 2.672.200            | 25.488.393.000       |
| 2024  | 1.786.878            | 24.818.285.000       |
| 2025  | 1.872.374            | 26.005.322.000       |

Sumber: KUD Mina Fajar Sidik (2021-2025)

Volume produksi pada tahun 2021 termasuk kategori produksi tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 3.899.300 kg dengan nilai produksi Rp32.843.190.000. Hasil produksi mengalami penurunan yang terus berlanjut. Pada tahun 2022 volume produksi turun menjadi 3.533.500 kg atau sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Produksi ikan semakin turun pada tahun 2023 dengan volume produksi 2.672.200 kg mencerminkan penyusutan sebesar 24,4%. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2024 yang mencatatkan penurunan paling besar 33,1% dengan volume produksi 1.786.878 kg.



Pada tahun 2025 terjadi peningkatan dari tahun 2024 dengan capaian volume produksi sebesar 1.872.374 kg. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim penangkapan, ketersediaan sumber daya ikan, dan biaya operasional nelayan yang sebagian besar dipengaruhi oleh harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan usaha perikanan karena berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem laut (Yudistira *et al.*, 2024).

### Implementasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan Kabupaten Subang berdasarkan persepsi 30 responden nelayan terhadap enam indikator evaluasi kebijakan meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dengan pilihan jawaban terdiri atas lima kategori dalam skala Likert. Rekapitulasi distribusi jawaban responden untuk seluruh indikator tercantum pada Tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Implementasi Indikator**

| Indikator     | SS | S  | N  | KS | TS | Total | Rata-rata | Persentase | Kategori |
|---------------|----|----|----|----|----|-------|-----------|------------|----------|
| Efektivitas   | 12 | 57 | 31 | 35 | 15 | 150   | 3,11      | 62%        | Setuju   |
| Efisiensi     | 17 | 41 | 31 | 29 | 2  | 120   | 3,35      | 67%        | Setuju   |
| Kecukupan     | 4  | 26 | 39 | 36 | 15 | 120   | 2,73      | 55%        | Netral   |
| Pemerataan    | 13 | 47 | 31 | 28 | 1  | 120   | 3,36      | 67%        | Setuju   |
| Responsivitas | 17 | 31 | 39 | 32 | 1  | 120   | 3,26      | 65%        | Setuju   |
| Ketepatan     | 14 | 53 | 40 | 31 | 12 | 150   | 3,17      | 63%        | Setuju   |

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju.

Sumber: Data primer diolah, 2026

#### a. Indikator Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan tangkap yang diukur melalui kemudahan perizinan, peningkatan hasil tangkapan melalui aturan alat tangkap, dukungan fasilitas pelabuhan, manfaat program pemerintah, dan penyuluhan. Distribusi jawaban responden pada indikator efektivitas pada Tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Indikator Efektivitas**

| No                    | Pernyataan                                                                                     | SS<br>(5) | S<br>(4) | N<br>(3) | KS<br>(2) | TS<br>(1) | Mean  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1                     | Izin kapal/usaha perikanan membantu kemudahan kegiatan melaut                                  | 2         | 12       | 7        | 7         | 2         | 3,17  |
| 2                     | Aturan penggunaan alat tangkap membantu meningkatkan hasil tangkapan                           | 0         | 10       | 5        | 11        | 4         | 2,70  |
| 3                     | Fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan membantu kelancaran kegiatan nelayan | 6         | 14       | 5        | 5         | 0         | 3,70  |
| 4                     | Program pemerintah KUSUKA atau bantuan lainnya bermanfaat bagi nelayan                         | 1         | 10       | 9        | 6         | 4         | 2,93  |
| 5                     | Kegiatan penyuluhan atau pelatihan dari pemerintah membantu pengetahuan dan kemampuan melaut   | 3         | 11       | 5        | 6         | 5         | 3,03  |
| Total Keseluruhan     |                                                                                                | 12        | 57       | 31       | 35        | 15        | 15,53 |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                                                | 3,11      |          |          |           |           |       |

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju

Sumber: Data primer diolah, 2026

Indikator efektivitas memperoleh total skor 466 dari skor maksimal 750 dan nilai rata-rata sebesar 3,11 dengan persentase 62% yang masuk dalam kategori setuju. Nilai tersebut menunjukkan nelayan menilai kebijakan pemerintah daerah cukup memberikan kemudahan perizinan, mendukung peningkatan hasil tangkapan, meningkatkan kapasitas nelayan melalui kegiatan penyuluhan,



meskipun program pemerintah seperti KUSUKA masih dinilai belum optimal yang dirasakan oleh nelayan.

### b. Indikator Efisiensi

Efisiensi merupakan tingkat optimalisasi kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang diukur melalui Kemudahan nelayan terhadap proses perizinan, kesesuaian antara biaya operasional dan hasil tangkapan, ketersediaan fasilitas pelabuhan, kesesuaian waktu pelaksanaan penyuluhan. Distribusi jawaban responden pada indikator Efisiensi pada Tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Indikator Efisiensi**

| No                    | Pernyataan                                                                                                              | SS<br>(5) | S<br>(4) | N<br>(3) | KS<br>(2) | TS<br>(1) | Mean  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1                     | Proses pengurusan izin tidak rumit dan tidak memakan waktu lama                                                         | 5         | 7        | 8        | 8         | 2         | 3,17  |
| 2                     | Alat tangkap yang saya gunakan sudah sesuai aturan pemerintah dan hasil tangkapan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan | 3         | 12       | 6        | 9         | 0         | 3,30  |
| 3                     | Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan mudah digunakan dan selalu tersedia                                    | 6         | 12       | 8        | 4         | 0         | 3,67  |
| 4                     | Penyuluhan dilaksanakan dengan waktu dan cara yang tidak mengganggu kegiatan nelayan                                    | 3         | 10       | 9        | 8         | 0         | 3,27  |
| Total Keseluruhan     |                                                                                                                         | 17        | 41       | 31       | 29        | 2         | 13,41 |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                                                                         | 3,35      |          |          |           |           |       |

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju

Sumber: Data primer diolah, 2026

Indikator efisiensi memperoleh total skor 402 dari skor maksimal 600 dan nilai rata-rata sebesar 3,35 dengan persentase 67% masuk dalam kategori setuju. Nilai tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ketersediaan fasilitas Pelabuhan dan kesesuaian penyuluhan cukup optimal, meskipun kesesuaian antara biaya operasional dan hasil tangkapan masih menjadi permasalahan nelayan di tengah tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak.

### c. Indikator Kecukupan

Kecukupan merupakan tingkat kecukupan kebijakan pemerintah mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan yang diukur melalui kejelasan informasi mengenai perizinan, tingkat pemahaman terhadap aturan alat tangkap, ketersediaan fasilitas pelabuhan sesuai kebutuhan, dan cakupan program pemerintah terhadap nelayan. Distribusi jawaban responden pada indikator kecukupan pada Tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Indikator Kecukupan**

| No                    | Pernyataan                                                                                                                                    | SS<br>(5) | S<br>(4) | N<br>(3) | KS<br>(2) | TS<br>(1) | Mean  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1                     | Informasi tentang pengurusan izin sudah cukup jelas                                                                                           | 1         | 6        | 12       | 7         | 4         | 2,77  |
| 2                     | Aturan alat tangkap yang ada sudah cukup membantu nelayan memahami aturan yang berlaku                                                        | 0         | 8        | 10       | 9         | 3         | 2,77  |
| 3                     | Fasilitas pelabuhan sudah cukup untuk kebutuhan nelayan                                                                                       | 2         | 6        | 9        | 9         | 4         | 2,77  |
| 4                     | Program pemerintah KUSUKA sudah cukup menjangkau semua nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan termasuk yang belum punya kartu nelayan | 1         | 6        | 8        | 11        | 4         | 2,63  |
| Total Keseluruhan     |                                                                                                                                               | 4         | 26       | 39       | 36        | 15        | 10,94 |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                                                                                               | 2,73      |          |          |           |           |       |





Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju  
Sumber: Data primer diolah, 2026

Indikator kecukupan memiliki nilai skor 328 dari skor maksimal 600 dan nilai rata-rata 2,73 dengan persentase 55% masuk dalam kategori netral menjadikan sebagai indikator nilai terendah di antara keenam indikator yang diukur. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan terutama jangkauan program seperti KUSUKA dan keterbatasan fasilitas yang masih perlu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

#### d. Indikator pemerataan

Pemerataan merupakan tingkat pemerataan manfaat kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan diukur melalui pemerataan penyampaian informasi perizinan, pemerataan informasi aturan alat tangkap, pemerataan program KUSUKA, aksesibilitas fasilitas pelabuhan bagi nelayan. Distribusi jawaban responden pada indikator pemerataan pada Tabel 10.

**Tabel 10. Hasil Indikator Pemerataan**

| No                    | Pernyataan                                                                                        | SS<br>(5) | S<br>(4) | N<br>(3) | KS<br>(2) | TS<br>(1) | Mean  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1                     | Informasi tentang pengurusan izin disampaikan kepada semua nelayan                                | 3         | 13       | 5        | 9         | 0         | 3,33  |
| 2                     | Informasi tentang aturan alat tangkap disampaikan kepada semua nelayan                            | 3         | 12       | 7        | 8         | 0         | 3,33  |
| 3                     | Program pemerintah KUSUKA diberikan secara merata kepada nelayan untuk punya kesempatan yang sama | 1         | 10       | 10       | 8         | 1         | 3,07  |
| 4                     | Semua nelayan bisa menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan                      | 6         | 12       | 9        | 3         | 0         | 3,70  |
| Total Keseluruhan     |                                                                                                   | 13        | 47       | 31       | 28        | 1         | 13,43 |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                                                   | 3,36      |          |          |           |           |       |

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju  
Sumber: Data primer diolah, 2026

Indikator pemerataan memperoleh total skor 403 dari skor maksimal 600 dan nilai rata-rata sebesar 3,36 dengan persentase 67% termasuk kategori setuju, selain itu sebagai indikator nilai tertinggi di antara keenam indikator yang diukur. Nilai tersebut mencerminkan bahwa manfaat kebijakan pemerintah daerah dalam hal penyampaian informasi perizinan dan ketentuan alat tangkap yang dirasakan relatif merata. Aksesibilitas terhadap fasilitas pelabuhan masih perlu ditingkatkan.

#### e. Indikator Responsivitas

Responsivitas merupakan tingkat pemerintah menyesuaikan dan menanggapi terhadap keluhan nelayan yang diukur melalui kesesuaian kebijakan perizinan, kesesuaian aturan alat tangkap, tanggapan terhadap keluhan nelayan, kesesuaian penyuluhan dengan kebutuhan nelayan. Distribusi jawaban responden pada indikator responsivitas pada Tabel 11.

**Tabel 11. Hasil Indikator Responsivitas**

| No | Pernyataan                                                           | SS<br>(5) | S<br>(4) | N<br>(3) | KS<br>(2) | TS<br>(1) | Mean |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 1  | Proses pengurusan izin sesuai dengan kemampuan dan kondisi nelayan   | 3         | 5        | 13       | 9         | 0         | 3,07 |
| 2  | Aturan alat tangkap sesuai dengan kondisi nelayan di lapangan        | 4         | 9        | 11       | 5         | 1         | 3,33 |
| 3  | Pengelola pelabuhan atau pemerintah cepat menanggapi keluhan nelayan | 6         | 6        | 8        | 10        | 0         | 3,27 |



|                       |                                                                              |      |    |    |    |   |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|---|-------|
| 4                     | Materi penyuluhan atau pelatihan sesuai dengan masalah yang dihadapi nelayan | 4    | 11 | 7  | 8  | 0 | 3,37  |
| Total Keseluruhan     |                                                                              | 17   | 31 | 39 | 32 | 1 | 13,03 |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                              | 3,26 |    |    |    |   |       |

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju

Sumber: Data primer diolah (2026)

Indikator responsivitas memperoleh total skor 391 dari skor maksimal 600 dan nilai rata-rata sebesar 3,26 dan persentase 65% termasuk kategori setuju. Pernyataan mengenai proses pengurusan izin memperoleh rata-rata skor terendah 3,07 yang mengindikasikan bahwa sistem perizinan yang berlaku dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap keterbatasan kapasitas nelayan kecil. Secara umum pemerintah daerah dinilai cukup responsif dalam merespons keluhan dan kebutuhan yang disampaikan nelayan.

#### f. Indikator ketepatan

Ketepatan merupakan tingkat ketepatan kebijakan pemerintah dengan pengembangan perikanan tangkap yang diukur melalui ketepatan kebijakan perizinan, ketepatan aturan alat tangkap, ketepatan fasilitas dengan kebutuhan nelayan, ketepatan KUSUKA untuk nelayan, ketepatan sasaran penyuluhan. Distribusi jawaban responden pada indikator ketepatan pada Tabel 12.

**Tabel 12. Hasil Indikator Ketepatan**

| No                    | Pernyataan                                                                                               | SS<br>(5) | S<br>(4) | N<br>(3) | KS<br>(2) | TS<br>(1) | Mean  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1                     | Proses pengurusan izin sudah tepat dengan kondisi nelayan                                                | 3         | 8        | 10       | 6         | 3         | 3,07  |
| 2                     | Aturan alat tangkap yang diterapkan sesuai dan tepat dengan kondisi wilayah penangkapan                  | 2         | 12       | 10       | 5         | 1         | 3,30  |
| 3                     | Fasilitas pelabuhan disediakan sudah tepat dengan kondisi nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan | 4         | 14       | 3        | 5         | 4         | 3,30  |
| 4                     | Program pemerintah KUSUKA sudah tepat untuk nelayan                                                      | 2         | 9        | 8        | 8         | 3         | 2,97  |
| 5                     | Penyuluhan atau pelatihan pemerintah sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nelayan                 | 3         | 10       | 9        | 7         | 1         | 3,23  |
| Total Keseluruhan     |                                                                                                          | 14        | 53       | 40       | 31        | 12        | 15,87 |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                                                          | 3,17      |          |          |           |           |       |

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju

Sumber: Data primer diolah, 2026

Indikator ketepatan memperoleh total skor 476 dari skor maksimal 750 dan nilai rata-rata sebesar 3,17 dan persentase 63% termasuk kategori setuju. Perolehan nilai tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dinilai cukup tepat sasaran dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap, meskipun ketepatan program KUSUKA bagi nelayan dan ketepatan sasaran penyuluhan masih perlu penyempurnaan lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan.

#### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi Pearson Product Moment melalui program SPSS dengan kriteria nilai  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$  (0,361;  $N=30$ ;  $\alpha=5\%$ ;  $df=28$ ). Hasil uji validitas terhadap 26 butir pernyataan tercantum pada Tabel 13.

**Tabel 13. Hasil Uji Validitas**

| Indikator          | Kode Butir | Nilai r-hitung | Nilai r-tabel | Status |
|--------------------|------------|----------------|---------------|--------|
| Efektivitas (X1)   | X1_1       | 0,461          | 0,361         | Valid  |
|                    | X1_2       | 0,381          | 0,361         | Valid  |
|                    | X1_3       | 0,661          | 0,361         | Valid  |
|                    | X1_4       | 0,683          | 0,361         | Valid  |
|                    | X1_5       | 0,611          | 0,361         | Valid  |
| Efisiensi (X2)     | X2_1       | 0,600          | 0,361         | Valid  |
|                    | X2_2       | 0,671          | 0,361         | Valid  |
|                    | X2_3       | 0,572          | 0,361         | Valid  |
|                    | X2_4       | 0,506          | 0,361         | Valid  |
| Kecukupan (X3)     | X3_1       | 0,711          | 0,361         | Valid  |
|                    | X3_2       | 0,672          | 0,361         | Valid  |
|                    | X3_3       | 0,661          | 0,361         | Valid  |
|                    | X3_4       | 0,683          | 0,361         | Valid  |
| Pemerataan (X4)    | X4_1       | 0,757          | 0,361         | Valid  |
|                    | X4_2       | 0,694          | 0,361         | Valid  |
|                    | X4_3       | 0,480          | 0,361         | Valid  |
|                    | X4_4       | 0,445          | 0,361         | Valid  |
| Responsivitas (X5) | X5_1       | 0,785          | 0,361         | Valid  |
|                    | X5_2       | 0,616          | 0,361         | Valid  |
|                    | X5_3       | 0,636          | 0,361         | Valid  |
|                    | X5_4       | 0,640          | 0,361         | Valid  |
| Ketepatan (X6)     | X6_1       | 0,651          | 0,361         | Valid  |
|                    | X6_2       | 0,673          | 0,361         | Valid  |
|                    | X6_3       | 0,662          | 0,361         | Valid  |
|                    | X6_4       | 0,535          | 0,361         | Valid  |
|                    | X6_5       | 0,465          | 0,361         | Valid  |

Sumber: Data primer diolah, 2026

Tabel 13 menunjukkan seluruh 26 butir pernyataan memiliki nilai r-hitung lebih besar dibandingkan r-tabel, sehingga seluruh data dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. Konsistensi rentang r-hitung di atas 0,361 pada seluruh indikator menunjukkan instrumen penelitian mampu mengukur secara konsisten.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dan keandalan instrumen penelitian menggunakan metode *Cronbach's Alpha* yang diolah melalui SPSS dengan hasil disajikan pada Tabel 14.

**Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas**

| Indikator          | Nilai Cronbach's Alpha | Interval  | Tingkat Reliabilitas |
|--------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| Efektivitas (X1)   | 0,779                  | 0,61-0,80 | Reliabel             |
| Efisiensi (X2)     | 0,779                  | 0,61-0,80 | Reliabel             |
| Kecukupan (X3)     | 0,844                  | 0,81-1,00 | Sangat Reliabel      |
| Pemerataan (X4)    | 0,783                  | 0,61-0,80 | Reliabel             |
| Responsivitas (X5) | 0,834                  | 0,81-1,00 | Sangat Reliabel      |
| Ketepatan (X6)     | 0,806                  | 0,81-1,00 | Sangat Reliabel      |

Sumber: Data primer diolah, 2026

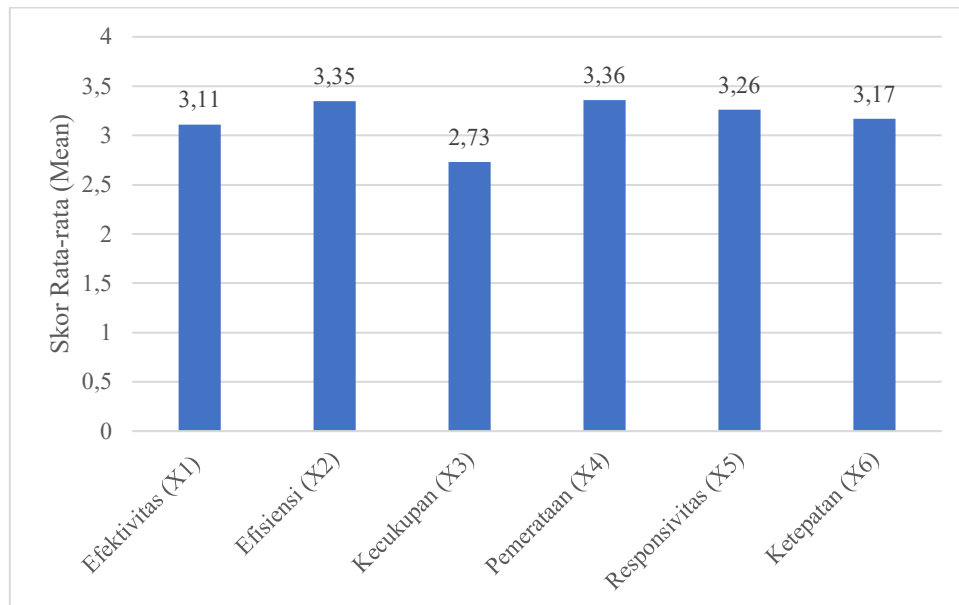
Tabel 14 menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,61 sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* tertinggi pada indikator



kecukupan sebesar 0,844 yang menunjukkan bahwa butir-butir indikator tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi menghasilkan seluruh pertanyaan indikator kecukupan mengukur yang sama dan memberikan kepercayaan bahwa instrumen secara konsisten dalam pengukuran.

### Perbandingan Indikator

Perbandingan nilai indikator implementasi kebijakan pemerintah daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Perbandingan Nilai Rata-rata Indikator Implementasi**

Indikator pemerataan (X4) posisi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,36 diikuti oleh indikator Efisiensi (X2) sebesar 3,35. Indikator responsivitas (X5) dengan nilai rata-rata sebesar 3,26. Indikator ketepatan (X6) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,17, dan Indikator efektivitas (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,11. Posisi terendah adalah indikator kecukupan (X3) yang memiliki nilai jauh dibandingkan indikator lainnya dengan nilai rata-rata yaitu 2,73. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai tergolong cukup efektif dengan lima dari enam indikator berada pada kategori setuju, sedangkan indikator kecukupan berada pada kategori netral.

### Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil wawancara Dinas Perikanan Kabupaten Subang dan pengelola KUD Mina Fajar Sidik bahwa keberadaan KUD Mina Fajar Sidik yang berdiri sejak 1966 merupakan faktor pendukung utama sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan nelayan didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana pelabuhan serta pembinaan rutin Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Faktor penghambat diidentifikasi melalui hasil wawancara dan kuesioner.

Keterangan yang diperoleh dari pengelola KUD Mina Fajar Sidik mengungkapkan bahwa tingginya beban biaya bahan bakar yang mencapai sekitar 65-70% dari total biaya operasional menjadi salah satu permasalahan dan kondisi tersebut ditambah oleh pemangkasan kuota subsidi dari 364 menjadi 274 kiloliter menghasilkan nelayan membeli solar non-subsidi dengan harga berkisar Rp26.000-Rp30.000 per liter.

Menurut nelayan proses perizinan dinilai rumit dikarenakan tidak semua memahami alur perizinan, selain itu pemasangan alat VMS (*Vessel Monitoring System*) dianggap kurang proporsional bagi nelayan kecil. Hal ini sesuai dengan nilai kuesioner pada indikator responsivitas dengan pernyataan proses perizinan memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 3,07. Ketentuan mengenai alat

tangkap sebagian nelayan masih memberatkan dari sisi ekonomi nelayan. Kesiediaan nelayan untuk mematuhi aturan tersebut sangat bergantung pada jaminan kesejahteraan yang diberikan pemerintah.

Hasil wawancara Dinas Perikanan Kabupaten Subang mengungkapkan bahwa KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) belum menjangkau seluruh nelayan disebabkan oleh rendahnya literasi nelayan dan bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil kuesioner nilai rata-rata terendah pada indikator kecukupan yaitu 2,63.

Berdasarkan wawancara pengelola KUD Mina Fajar Sidik mengungkapkan menurunnya jumlah nelayan muda akibat benturan antara tradisi mengenalkan anak pada kehidupan melaut sejak dini dengan regulasi perlindungan anak yang berlaku. Ketiadaan mekanisme transisi dapat mempertemukan kedua kepentingan tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan regenerasi berikutnya.

### Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan Kabupaten Subang yaitu pemerintah perlu memperkuat mekanisme perizinan berbasis digital dengan pendampingan dan pelatihan literasi digital bagi nelayan. Perluasan jangkauan program KUSUKA perlu didorong melalui sosialisasi atau penyuluhan yang lebih intensif dan pendampingan administrasi, selain itu upaya pemerataan akses terhadap bantuan, subsidi, dan fasilitas pelabuhan.

Pemerintah daerah perlu mengadvokasi peningkatan kuota subsidi bahan bakar ke pemerintah pusat berdasarkan data kebutuhan operasional nelayan. Pemerintah perlu meningkatkan relevansi materi penyuluhan sesuai kebutuhan di lapangan termasuk pelatihan navigasi dan pengenalan teknologi penangkapan modern. Penguatan kelembagaan KUD Mina Fajar Sidik dengan pemerintah perlu terus ditingkatkan. Program regenerasi nelayan yang terencana dan terstruktur meliputi pelatihan keterampilan bagi generasi muda, regenerasi nelayan juga perlu dirancang secara sinergis dengan kebijakan lainnya untuk menjaga keberlanjutan perikanan tangkap dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan tergolong cukup efektif berdasarkan enam indikator evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kategori kecukupan sebagai titik lemah bahwa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan. Kelemahan pada keterbatasan anggaran, rendahnya literasi nelayan, kenaikan harga bahan bakar, penurunan produksi, dan krisis regenerasi. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada peningkatan koordinasi, optimalisasi, perbaikan sistem, penguatan lembaga, dan peningkatan kapasitas nelayan. Pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan lapangan dan penguatan regenerasi nelayan merupakan utama dalam keberlanjutan sektor perikanan tangkap.

### Saran

Pemerintah perlu memperkuat perencanaan program melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan nelayan supaya kebijakan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, N., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01). <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i01.502>
- Amalia, R. N., Dianingati, R. S., & Annisaa', E. (2022). Pengaruh Jumlah Responden terhadap Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan dan Perilaku Swamedikasi. *Generics: Journal of Research in Pharmacy*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/genres.v2i1.12271>





- Bussalam, R., & Hunianto. (2024). The potential of capture fisheries production in Jawa Barat province. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 4471–4479.
- Ekasari, S., Utomo, S., Budiarto, B. W., Pujiastuti, E., & Setiawan, R. (2025). Sosialisasi Pentingnya Manajemen Pelatihan Kerja sebagai Pengembangan Jenjang Karier Karyawan Berbasis Digital. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(9).
- Husuna, F., Rantung, S. V., & Kotambunan, O. O. (2017). Penilaian Nelayan Terhadap Program Pengembangan Perikanan Tangkap Huhate Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. *AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)*, 5(9).
- Jaya, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16(1). <https://doi.org/10.29406/jmm.v16i1.2136>
- Malik, H., & Saribulan, N. (2018). Implementasi Kebijakan Usaha Perikanan Melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1101>
- Mustaruddin, Agustina, D., Puspito, G., Baskoro, M. S., & Aini, S. N. (2023). Teknik Penanganan Komponen Sisa Pada Operasi Industri Penangkapan Ikan Yang Berbasis Di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 7(1). <https://doi.org/10.29244/core.7.1.063-073>
- Natsir, L. F., & Kartini, M. (2025). Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kelompok mina mandiri glayem di desa jontikedokan kecamatan jontinyuat kabupaten indramayu. 02(03), 127–136.
- Prambudi, J., & Imantoro, J. (2021). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada UKM Maleo Lampung Timur. *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 1(3). <https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v1i3.728>
- Purnia, D. S., Adiwisatra, M. F., Muhajir, H., & Supriadi, D. (2020). Pengukuran Kesenjangan Digital Menggunakan Metode Deskriptif Berbasis Website. *EVOLUSI: Jurnal Sains Dan Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/evolusi.v8i2.8942>
- Risianti, D. H., & Fathurrochman, I. (2020). Penilaian Konseling Kelompok - Google Buku. In *Deepublish*.
- Sugiono, N. A. W. (2020). Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation. *Jurnal Keterampilan Fisik*, 5(1).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3).
- Yudistira Aprianto, Samliok Ndobe, Zakirah Raihani Ya'la, A. R. dan N. S. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap. *Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Kecamatan Mantikulore, Kota Palu*, 1(1), 21–30.